

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan sebuah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk, didalam desa terdapat lembaga pemerintah terendah yang dipimpin oleh camat. Semua kebutuhan masyarakat terkait administrasi atau hal-hal lainnya bisa langsung menuju ke kantor desa yang berkaitan. Desa sendiri memiliki banyak fasilitas yang memang harus digunakan oleh masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) jumlah desa di Indonesia mencapai 81.616 desa. Setiap desa dipimpin dan dikelola sendiri (mandiri) oleh Pemerintah Desa setempat. Pemerintah Desa merupakan suatu bagian dari birokrasi negara serta sebagai pemimpin lokal yang mempunyai posisi dan peranan penting dalam hal untuk membangun dan mengelola pemerintahan(Suwarno, 2012). Desa memiliki tugas untuk melakukan pelayanan publik seperti pemberdayaan masyarakat dikarenakan pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan dan program yang tepat dibuat atau disiapkan oleh Perangkat Desa. Pelayanan publik menjadi bagian yang penting diperhatikan dalam pembangunan otonomi, karena selain sesuai dengan dasar reformasi bidang pemerintahan, demikian pula berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik. Pelayanan publik yang baik merupakan hal wajib yang harus dipenuhi pada setiap organisasi, baik Pemerintah maupun swasta. Pelayanan publik yang maksimal tercermin dari sumber daya yang mumpuni untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas tugas yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan fungsi pelayanan, Pemerintah Desa Pegundan bertindak sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah, karena akan berhubungan dengan masyarakat. Salah satu masalah pada pelayanan kependudukan di Desa Pegundan adalah seperti pelayanan kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang terjadi penundaan pembuatan dokumen. Penundaan inilah yang menajdi salah satu hal yang membuat masyarakat desa

pangundan merasa kecewa. Jika hal-hal tersebut disepelekan maka akan timbul persepsi bahwa pelayanan tidak sesuai harapan masyarakat yang telah mendambakan tentang kualitas pelayanan yang baik. Menurut (Tamami, 2016) Kualitas Pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ketepatan penyampaianya dalam mengimbangi harapan masyarakat. Oleh karena itu, upaya-upaya Pemerintah Desa terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan, selain untuk memahami profesionalisme dan akuntabilitas pemerintah desa, bersamaan pula untuk memperoleh informasi lebih dalam tentang kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan.

Perangkat desa memiliki peranan penting untuk pemberdayaan masyarakat karena merupakan perwakilan pemerintah yang berada di tingkat Desa. Perangkat desa diharapkan mampu mengelola berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa, untuk melaksanakan kegiatan atau program tersebut, perangkat desa harus memiliki kualitas atau kompetensi yang memadai. Kompetensi yang memadai merupakan hal yang sangat penting agar dapat membantu Kepala Desa.

Dalam menjalankan tata pemerintahan, perangkat desa harus memiliki kompetensi. Yang dimaksudkan dengan kompetensi adalah seperangkat kemampuan dan kemauan seseorang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di pemerintah desa guna mencapai tujuan utama yang efektif dan efisien. Ada tiga kompetensi dasar yang harus dimiliki perangkat Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, yaitu kompetensi dasar meliputi pengetahuan tentang regulasi desa, dasar-dasar pemerintahan Desa, serta tugas pokok dan fungsi. Kompetensi manajemen meliputi beberapa indikator yaitu manajemen sumber daya manusia, pelayanan publik, aset, dan keuangan. Kompetensi teknis terdiri dari penyusunan administrasi desa, perencanaan pembangunan, anggaran, peraturan desa, pelayanan publik, serta pengaplikasian komputer dan internet. Namun terdapat masalah terkait kemampuan Perangkat desa atau aparatur desa dalam menggunakan komputer dan internet yang masih belum maksimal dan bahkan masih banyak perangkat desa yang tidak bisa menggunakan atau menguasai ilmu komputer. Salah satu faktor tersebut adalah



disebabkan oleh faktor usia. Menurut data yang ada, usia rata-rata perangkat desa di desa Pegundan rata rata berumur 50 tahun. Hal tersebut menjadi salah satu penghambat terjadinya kualitas pelayanan yang kurang maksimal. Menurut (Nurmasitha & Hakim, 2019) Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan peranannya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang di miliki.

Maka dari itu mengacu pada konsep tersebut perangkat desa harus mampu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan diri yang didukung motivasi belajar, nilai-nilai kreativitas, dan inovasi. Tanpa itu semuanya, mustahil aparatur pemerintahan desa dapat menjadi motor pembangunan yang berkemajuan dan menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian, kompetensi perangkat desa memiliki arti penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna mewujudkan visi yang menyejahterakan masyarakat, meningkatkan daya saing, memperkuat perekonomian dan meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik adalah dengan cara memproses pengembangan kompetensi aparatur desa. Hal ini cukup beralasan sebab aparatur desa merupakan garda depan dan bertatap muka langsung dengan masyarakat dalam pelayanan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya untuk meningkatkan pemberdayaan dan kualitas pelayanan di desa yang baik peran dari kepemimpinan adalah salah satu hal yang sangat penting. Di dalam organisasi ada dua pihak, yaitu atasan sebagai pemimpin dan karyawan sebagai bawahannya. Peran pemimpin disini guna menggerakkan dan mengarahkan organisasi agar segera mencapai tujuannya. Tentunya bukan pekerjaan yang ringan karena harus memahami karakter bawahannya masing masing.

Dalam lingkup struktur organisasi pemerintahan Indonesia, yang merupakan kepemimpinan puncak adalah presiden dan yang merupakan kepemimpinan terbawah adalah Kepala Desa. Kepala Desa adalah pemimpin yang terpilih secara demokratis dan tradisional oleh warga yang mana dia adalah

seorang perpanjangan tangan dari masyarakat untuk mengatur, memelihara dan memotivasi masyarakatnya di Desa, oleh karena itu kepemimpinan Kepala Desa sangat mempengaruhi perkembangan mundur atau majunya pengembangan desa. efektivitas pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan upaya memberikan pengarahan dan bimbingan yang dapat meningkatkan kompetensi dan tanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan masyarakat.

Menurut (Setiadi, 2018) kepemimpinan terletak pada setiap keberhasilan program yang dijalankan oleh tim, serta kepemimpinan juga harus mampu mengawali sekaligus mengarahkan anggota tim. Untuk mengetahui kepemimpinan Kepala Desa di Kantor Desa Pegundan Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Peneliti melakukan penelitian menggunakan teori menurut (Wendari, 2021) yang terdiri dari tiga aspek Gaya Kepemimpinan yaitu: Gaya Kepemimpinan Otokratis, Gaya kepemimpinan Demokratis, dan Gaya Kepemimpinan Laissez Faire. Pertama Gaya Kepemimpinan Otokratis yaitu gaya kepemimpinan otoritarian dapat pula disebut tukang cerita. Pemimpin otokratis biasanya merasa bahwa mereka mengetahui apa yang mereka inginkan dan cenderung mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam bentuk perintah-perintah langsung kepada bawahan. Kedua Gaya Kepemimpinan Demokratis yaitu gaya kepemimpinan yang di kenal pula sebagai gaya partisipatif. Gaya ini berasumsi bahwa para anggota organisasi yang ambil bagian secara pribadi dalam proses pengambilan keputusan akan lebih memungkinkan sebagai suatu akibat mempunyai komitmen yang jauh lebih besar pada sasaran dan tujuan organisasi. Dan ketiga Gaya Kepemimpinan Laissez Faire yaitu gaya kepemimpinan kendali bebas. Pendekatan ini bukan berarti tidak adanya sama sekali pemimpin. Gaya ini berasumsi bahwa suatu tugas disajikan kepada kelompok yang biasanya menentukan teknik-teknik mereka sendiri guna mencapai tujuan tersebut dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dan kebijakan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bendahara Desa Pegundan yakni Bapak Muh Nafi' pada tanggal 28 juni 2023 bertempat di kediaman beliau, menurutnya terlihat bahwa Gaya kepemimpinan Kepala Desa di Kantor Desa Pegundan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik



masih belum berhasil dalam menjalankan kepemimpinannya. Dimana para pegawai masih bebas atau dengan kata lain semau mereka sendiri dalam melakukan pekerjaan tanpa adanya perintah langsung dari atasan. Pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan masih saja mengalami keterlambatan dalam bekerja. Dalam hal Kedisiplinan pun para Pegawai di Kantor Desa Pegundan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik sangat buruk, seperti: sering terlambat, meninggalkan kantor saat jam kerja dan bahkan pulang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum optimalnya Gaya Kepemimpinan Kepala Desa.

Seorang pemimpin memiliki peran yang sangat strategis dan berperan penting untuk mencapai sebuah visi, misi serta tujuan organisasi. Suatu organisasi membutuhkan pemimpin yang efektif dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku anggota tim. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk meningkatkan citra kerja serta kinerja pemerintah yang dapat menunjang profesionalisme pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya suatu penyatuan arah dan pandangan bagi segenap jajaran pegawai pemerintah yang dapat digunakan atau sebagai acuan untuk melaksanakan tugas baik organisasi (Juarinik & Suparni, 2018).

Pada penelitian sebelumnya yang di lakukan menurut hasil penelitian dari (Lassa & Tiza, 2021) dapat disimpulkan bahwa Gaya Kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan sedangkan pada penelitian (Juarinik & Suparni, 2018) terdapat pengaruh positif terhadap Kualitas Pelayanan. Sedangkan Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nursiswo & Pramusinto, 2019), mendapatkan hasil bahwa Kompetensi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Pelayanan sedangkan pada penelitian (Setiadi, 2018) menjelaskan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelayanan.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas dan penelitian terdahulu. Peneliti ingin meneliti tentang “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi Perangkat Desa terhadap Kualitas Pelayanan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah gaya kepemimpinan dan kompetensi perangkat desa dapat berpengaruh bersama sama terhadap Kualitas pelayanan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Pegundan, Kec. Bungah, Kab. Gresik ?
2. Apakah kompetensi perangkat desa dapat berpengaruh terhadap Kualitas pelayanan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Pegundan, Kec. Bungah, Kab.Gresik ?
3. Apakah gaya kepemimpinan Kepala desa berpengaruh terhadap Kualitas pelayanan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Pegundan, Kec.Bungah,Kab.Gresik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian maka peneliti dapat menyusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi terhadap Kualitas pelayanan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Pegundan, Kec. Bungah, Kab. Gresik
2. Untuk menganalisis Kompetensi perangkat desa terhadap Kualitas pelayanan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Pegundan, Kec. Bungah, Kab. Gresik
3. Untuk menganalisis pengaruh Gaya Kepemimpinan kepala desa terhadap Kualitas pelayanan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Pegundan, Kec. Bungah, Kab. Gresik

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan menambah khasanah keilmuan sekaligus berpartisipasi aktif dalam pengembangan pemikiran bagi mahasiswa tentang makna



Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi perangkat desa dalam menerapkan Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi perangkat desa untuk Pemberdayaan Desa. dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai rujukan atau referensi bagi kalangan akademik dalam menambah wawasan pengetahuan maupun sebagai acuan penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan referensi dalam peningkatan pelayanan masyarakat dengan menerapkan Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi perangkat desa untuk Pemberdayaan Desa.

